

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas yang diterapkan Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilu 2024 bukanlah strategi yang bersifat primordial atau eksklusif, melainkan berupa politik identitas yang didasarkan pada isu-isu tertentu. Politik ini mengandung aspek representasi, kritik terhadap struktur kekuasaan, serta upaya membangun ulang hubungan antara negara dan warga negaranya. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa identitas politik Anies dibentuk melalui lima narasi utama, yaitu keadilan sosial, ketimpangan sosial, pembangunan yang merata, perjuangan perubahan, serta peran negara terhadap rakyat. Kelima narasi ini berfungsi sebagai alat simbolis untuk mengenali dan menggabungkan kelompok-kelompok yang merasa tidak mendapatkan perhatian dari kebijakan pemerintah.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa politik identitas yang digunakan Anies tidak diarahkan untuk memecah masyarakat berdasarkan garis-garis primordial seperti etnis, agama, atau budaya sebagaimana praktik yang sering muncul dalam kontestasi politik sebelumnya di Indonesia. Sebaliknya, identitas yang dibangun bersifat **inklusif, cair, dan konstruktif**, dengan menekankan perasaan kolektif sebagai warga negara yang menuntut keadilan dan kesetaraan struktural. Dengan demikian, politik identitas yang digunakan cenderung membentuk **solidaritas horizontal** antar kelompok sosial, bukan segregasi vertikal yang menyalakan polarisasi identitas tetap.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi politik identitas Anies berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, di mana berbagai isu seperti ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya, kesenjangan dalam kesejahteraan, ketimpangan dalam pembangunan, dan rendahnya keterlibatan negara dalam memperhatikan kepentingan rakyat menjadi pusat dari identitas kolektif pemilih. Identitas politik "rakyat yang membutuhkan perubahan" menjadi kerangka yang menghubungkan berbagai narasi dan memberikan dasar moral bagi posisi politik Anies. Identitas ini bersifat relasional, terbentuk melalui perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil, serta bersifat performatif karena dihasilkan melalui pembicaraan, simbol, dan peneguhan visi perubahan.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas yang digunakan oleh Anies berlangsung dalam kerangka program yang terstruktur, bukan hanya sebagai bentuk simbolik. Identitas politik ditunjang dengan penawaran kebijakan agenda yang jelas, sehingga narasi yang disampaikan tidak hanya memperkuat perasaan emosional, tetapi juga mencakup aspek kebijakan yang berpikir secara rasional. Pendekatan ini memperjelas bahwa politik identitas masa kini tidak selalu bergantung pada kategori yang tetap, melainkan bisa berubah menjadi identitas politik sementara yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pemilihan tanpa menghilangkan isu-isu kebijakan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa politik identitas yang digunakan Anies berakar pada dinamika demokrasi kontemporer Indonesia, di mana semakin banyak warga yang mengalami ketidakpuasan terhadap negara dan menuntut representasi yang lebih adil. Dalam konteks tersebut, politik identitas berbasis isu menjadi relevan sebagai respon terhadap kegagalan negara dalam menjamin akses yang setara terhadap kesejahteraan dan layanan publik. Identitas ini tidak hanya memosisikan Anies sebagai figur perubahan, tetapi juga menciptakan arena politik baru yang memungkinkan

munculnya solidaritas lintas kelas, lintas wilayah, dan lintas pengalaman sosial.

Dengan demikian, kesimpulan akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas yang digunakan oleh Anies Baswedan dalam Pemilu 2024 adalah sebuah strategi politik yang menggabungkan aspek representasi struktural, pemingkanaan moral, serta agenda kebijakan berupa program-program konkret, dengan tujuan untuk membangun koalisi pemilih yang luas. Politik identitas yang diterapkan tidak menyebabkan perpecahan, melainkan justru memperkuat aspirasi keadilan sosial yang ada di berbagai lapisan masyarakat. Temuan ini juga menunjukkan perubahan penting dalam cara politik identitas dilakukan di Indonesia, yaitu dari pendekatan politik identitas yang bergantung pada kategori yang tetap ke pendekatan yang lebih berbasis isu. Pendekatan ini bertujuan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat serta menekankan pentingnya perubahan pada struktur sosial dan politik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkaya praktik politik dan penelitian akademik selanjutnya. Secara praktis, kandidat maupun aktor politik disarankan untuk mengembangkan strategi politik identitas berbasis isu sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan politik identitas eksklusif. Pendekatan ini tidak hanya dapat meminimalkan polarisasi sosial, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi dengan mendorong aktor politik untuk berfokus pada persoalan substantif seperti ketimpangan, keadilan sosial, dan inklusivitas kebijakan publik.

Dalam perspektif kebijakan publik, narasi berbasis identitas yang mengangkat isu keadilan dan pemerataan perlu direspons oleh negara melalui perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap warga yang termarginalkan. Ketimpangan sosial yang digunakan sebagai dasar

pembentukan identitas politik harus menjadi peringatan bagi negara bahwa sistem distribusi sumber daya belum berjalan adil. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme representasi, pemerataan pembangunan, dan akses terhadap layanan publik guna mencegah munculnya identitas perlawanan yang bersifat reaktif.

Secara akademik, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya dengan melakukan perbandingan strategi politik identitas antar kandidat pada Pemilu 2024 untuk melihat pola umum penggunaan politik identitas dalam politik elektoral Indonesia modern. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas basis data dengan teknik *in-depth interview*, analisis wacana kritis, serta studi perilaku pemilih untuk memahami bagaimana identitas politik diterima, diproduksi, dan direproduksi oleh warga negara dalam konteks politik elektoral.

Selain itu, penelitian ke depan perlu mengkaji bagaimana politik identitas berbasis isu mempengaruhi proses konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang. Apakah strategi identitas berbasis keadilan sosial dapat memperkuat budaya politik partisipatoris atau justru melahirkan identitas politik baru yang rentan dimanipulasi oleh elite? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting dijawab agar kita dapat memahami arah perkembangan politik identitas di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi bagaimana praktik politik identitas berbasis isu dapat diterjemahkan ke dalam proses pemerintahan jika kandidat yang menggunakannya terpilih. Hal ini penting untuk melihat apakah identitas yang dibangun dalam masa kampanye dapat bertahan sebagai prinsip politik atau hanya berfungsi sebagai alat elektoral semata.